

MUSHAF AL-QUR'AN BRAILLE PASCA-STANDARDISASI Dari Fase Transisi Menuju Fase Revisi (1984-2014)

The Braille Mushaf after the Standardization: From the Phase of Transition to that of Revision (1984-2014)

مصحف برايل المعياري ما بعد التعيير: من مرحلة الانتقال إلى مرحلة التعديل (١٩٨٤-٢٠١٤)

Ahmad Jaeni

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI, Jakarta
ahmad_jaeni@kemenag.go.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji sejarah perkembangan mushaf Al-Qur'an braille di Indonesia setelah distandarkan dan dikukuhkan sebagai Mushaf Standar Braille melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984. Fase penting ini menjadi titik tolak bagi seluruh pihak terkait untuk menjadikan Mushaf Standar Braille sebagai satu-satunya pedoman dalam penerbitan, pentashihan, dan penggunaan. Melalui pendekatan sejarah dengan menggali informasi dari narasumber dan dokumen yang ada, kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi pasca-penetapan Mushaf Standar Braille tergambar dalam beberapa fase. Fase awal merupakan masa transisi yang menggambarkan eksistensi Mushaf Standar Braille belum sepenuhnya menjadi rujukan di tingkat pengguna. Fase berikutnya adalah fase penguatan awal yang memperlihatkan Mushaf Standar Braille sudah menjadi rujukan dan telah digunakan secara lebih luas. Fase penguatan berikutnya ditandai dengan lahirnya edisi revisi Mushaf Standar Braille sebagai kesepakatan baru. Dari seluruh dinamika tersebut peran pemerintah menjadi kunci.

Kata Kunci

Mushaf Standar Indonesia, standarisasi mushaf, Mushaf Standar Braille.

Abstract

This writing studies the history of the development of the Braille Mushaf of Indonesia after being standardized and confirmed as the Braille Standard Mushaf through the decree of the Minister of Religious Affairs No. 25, 1984. This important phase becomes the starting point for all those who concerned to make the Braille Standard Mushaf as the only guideline in the publication, correction and use. It is through the historical approach by exploring the information from the sources and existing documents that the study arrives at the conclusion that the dynamics occurred after the determination of the Braille Standard Mushaf is reflected in some phases. The early phase is a transitional phase which described the existence of the Braille Standard Mushaf which had not become fully reference yet at the level of the users. The next phase is the phase of the strengthening which is marked by the birth of the revised edition of the Braille Standard Mushaf and has been used more widely. The phase of the nest strengthening is marked by the revised edition of the Braille Standard Mushaf as the new agreement. Of all those dynamics, the role of the government thus becomes the key.

Keywords

Indonesian Standard Qur'an, standardisation of mushaf, Braille Standard Mushaf.

ملخص

هذه الكتابة تبحث عن تاريخ تطور مصحف برايل في إندونيسيا بعد اعتماده كمصحف برايل المعياري من خلال قرار وزير الشؤون الدينية رقم ٢٥ سنة ١٩٨٤. هذه المرحلة المهمة تعتبر منطلقاً لجميع الجهات المعنية لاتخاذ مصحف برايل المعياري كمرجع وحيد للنشر والمراجعة والاستخدام. من خلال المقاربة التاريخية عن طريق جمع المعلومات من المصادر والوثائق المتاحة، وصل هذا البحث إلى نتيجة بأن أحداث ما بعد اعتماد مصحف برايل المعياري تتصور في عدة مراحل. المرحلة الأولى، وهي المرحلة الانتقالية تصور وضع مصحف برايل المعياري بحيث لم يصبح مرجعاً بشكل كامل على مستوى المستخدم. والمرحلة التالية وهي مرحلة التقوية الأولى أظهرت مصحف برايل المعياري في وضع أصبح فيه مرجعاً بشكل أوسع. أما مرحلة التقوية التالية فعملية بولادة الإصدار المعدل لمصحف برايل المعياري كاتفاق جديد. وفي جميع تلك المراحل أدت الحكومة دوراً مفتاحياً

كلمات مفتاحية

المصحف المعياري الإندونيسي، تعيير المصحف، مصحف برايل المعياري

Pendahuluan

Salah satu fase penting dalam sejarah perkembangan mushaf Al-Qur'an braille di Indonesia adalah fase standarisasi setelah sebelumnya melalui fase duplikasi dan adaptasi. Fase duplikasi ditandai dengan disalinnya mushaf Al-Qur'an braille untuk pertama kalinya oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) di Yogyakarta dengan mengadopsi sistem yang digunakan oleh mushaf braille edisi Yordania tahun 1952. Adapun fase adaptasi ditandai dengan munculnya dua edisi mushaf braille dengan perbedaan sistem penulisan. Yaketunis mengembangkan mushaf braille versi Yordania dengan menambahkan sistem penandaan tajwid dari mushaf braille edisi Pakistan, sedangkan Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) yang berkedudukan di Bandung melakukan penyusunan mushaf braille dengan melakukan adaptasi terhadap sistem penulisan yang digunakan pada mushaf cetak tahun 60-an (Jaeni 2015: 54). Perbedaan inilah akhirnya melahirkan polemik di antara praktisi dan pengguna di kalangan penyandang disabilitas sensorik netra.

Pada fase standarisasi sebuah upaya besar dilakukan oleh para ulama Al-Qur'an, praktisi dan perwakilan pemerintah dalam merumuskan sebuah formula mushaf Al-Qur'an braille yang dapat diterima oleh semua pihak. Upaya yang cukup menguras energi tersebut dilakukan dalam bentuk Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Departemen Agama selama 9 kali (1973 s.d 1983). Proses yang cukup panjang akhirnya melahirkan sebuah formula dalam bentuk Mushaf Standar Braille yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Standar Indonesia. Selain Mushaf Standar Braille, dua varian mushaf lain juga ditetapkan, yaitu Mushaf Standar Usmani dan Mushaf Standar Bahriyah.

Sebagai salah satu mushaf yang telah dibakukan sistem penulisannya, kehadiran Mushaf Standar Braille diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi penerbitan Al-Qur'an braille di Indonesia. Semua polemik akibat perbedaan sistem yang dikembangkan dua lembaga pelopor, Yaketunis dan YPWG dengan demikian dapat diakhiri. Selain itu, dengan adanya Mushaf Standar Braille, proses pentashihan juga dapat dilakukan dengan lebih efektif karena tersedianya rujukan atau pedoman yang sama. Namun kenyataannya, diskusi dan perdebatan di kalangan para praktisi dan pengguna Al-Qur'an braille terkait sistem penulisan Mushaf Standar Braille masih terjadi. Hal itu disebabkan karena belum adanya pedoman penulisan yang dibuat secara lebih rinci (Yunardi 2012: 265).

Alasan belum rincinya pedoman penulisan pada Mushaf Standar Braille tentu bukan faktor satu-satunya yang menyebabkan masih munculnya polemik di kalangan praktisi dan pengguna Al-Qur'an braille. Polemik muncul tidak semata karena faktor teks yang masih dianggap problematik, namun juga dimungkinkan karena faktor lain menyangkut kebijakan dan kelembagaan. Atas dasar itu tulisan ini berupaya untuk

mengungkap berbagai dinamika yang terjadi pasca standardisasi mushaf braille dilakukan sehingga Mushaf Standar Braille eksistensinya benar-benar diterima oleh semua pihak.

Kajian ini penting setidaknya untuk melengkapi sejarah perkembangan mushaf braille di Indonesia yang telah ada. Sebagai sebuah kajian sejarah, kajian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur penelitian sejarah dengan menggali informasi dari sejumlah dokumen dan narasumber yang terkait.

Menilik Standardisasi Mushaf Al-Qur'an Braille

Standar secara leksikal berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan (Tim Redaksi 2008: 1375). Adapun secara teknis kata 'standar' digunakan untuk menunjukkan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait. Adapun standardisasi merupakan proses merumuskan dan menetapkan standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan (Purwanggono dkk 2009: 3). Standardisasi mushaf Al-Qur'an braille dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk merumuskan dan menetapkan kaidah penulisan mushaf Al-Qur'an dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks standardisasi mushaf Al-Qur'an braille di Indonesia, upaya tersebut dilakukan oleh Departemen Agama melalui Puslitbang Lektur Agama dengan melibatkan berbagai pihak, baik kalangan pemerintah, para ulama maupun para praktisi atau pengguna. Proses standardisasi setidaknya mempertimbangkan dua aspek, aspek formal dan aspek pragmatis. Aspek formal adalah upaya untuk merumuskan standar berdasarkan sumber-sumber teoritis tentang penulisan Al-Qur'an sedangkan aspek pragmatis berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat realitis dan praktis. Selain itu, standardisasi juga merupakan upaya strategis yang mempunyai dimensi kebijakan dan sosial. Dari sudut kebijakan, standardisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari solusi agar polemik akibat perbedaan yang ada dapat diakhiri. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan benefit dan eksekusi yang dirasakan oleh pihak-pihak akibat dari standardisasi yang telah dilakukan.

Proses standarisasi mushaf Al-Qur'an braille dilakukan secara simultan dengan standardisasi mushaf Al-Qur'an cetak selama 9 kali Mukernas Ulama Ahli Al-Qur'an (1973-1983 M). Proses panjang tersebut selain melibatkan para ulama ahli Al-Qur'an juga para praktisi Al-Qur'an braille, terutama yang mewakili dua aliran utama penulisan Al-Qur'an braille saat itu yaitu Yaketunis dan YPWG. Perbedaan utama dua aliran ini terletak pada pilihan rasm yang digunakan. Yaketunis bertahan dengan menggunakan rasm imlai, sistem yang digunakan sejak Al-Qur'an braille pertama kali muncul di Yordania dan diikuti oleh sejumlah negara lainnya. Sementara YPWG lebih memilih untuk mengadaptasi rasm usmani

yang digunakan dalam mushaf Al-Qur'an cetak tahun 60-an dan pernah dicetak oleh Departemen Agama. Selain itu, juga ada perbedaan terkait penggunaan beberapa tanda baca. Perbedaan inilah yang menimbulkan polemik di kalangan para pengguna.

Proses standarisasi Al-Qur'an braille akhirnya berujung pada proses unifikasi atau penyeragaman dalam beberapa aspek penulisan sehingga melahirkan sebuah formula Mushaf Standar Braille yang baru dan dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa aspek tersebut dapat disarikan dalam beberapa hal. *Pertama*, Mushaf Standar Braille ditulis dengan rasm usmani dan hal-hal yang menyulitkan tetap ditulis dengan rasm imla'i. *Kedua*, sistem rumusan kode braille dan penerapan sistem harakat menyesuaikan sistem yang telah digunakan Yaketunis maupun YPWG. *Ketiga*, penerapan tanda baca tajwid menyesuaikan sistem dalam mushaf cetak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh YPWG. *Keempat*, adanya penyederhanaan penggunaan tanda-tanda waqaf (Jaeni 2015: 62).

Pasca Mushaf Standar Braille Ditetapkan

Secara resmi hasil standarisasi mushaf Al-Qur'an braille tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar, Keputusan tersebut disusul dengan Instruksi Menteri Agama (IMA) No. 20 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur'an. Kedua regulasi tersebut ditetapkan pada 29 Maret 1984 dan ditandatangani oleh Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, Munawir Syadzali. Sejak saat itulah Indonesia memiliki Mushaf Al-Qur'an Standar dengan tiga jenisnya, yaitu Mushaf Standar Usmani, Mushaf Standar Bahriyah dan Mushaf Standar Braille.

Kehadiran Mushaf Standar Braille menuntut seluruh pihak terkait untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pentashihan, penerbitan dan penggunaan. Upaya untuk membuat Mushaf Standar Braille benar-benar menjadi satu-satunya pedoman dalam penerbitan, pentashihan dan penggunaannya membutuhkan waktu yang tidak singkat, setidaknya melewati dua fase, yaitu fase transisi dan fase penguatan. Dua fase ini setidaknya menggambarkan sejarah perkembangan mushaf braille di Indonesia pasca standarisasi dan ditetapkannya Mushaf Standar Braille.

Fase Transisi: Peralihan Menuju Mushaf Standar Braille (1984-2000)

Fase ini merupakan rentang waktu (*time span*) yang menuntut semua pihak, mulai dari pencetak Al-Qur'an braille, lembaga pentashih Al-Qur'an dan para pengguna untuk menyesuaikan diri dan mulai menggunakan mushaf braille yang berpedoman pada Mushaf Standar Braille. Gambaran penting fase ini adalah belum sepenuhnya Mushaf Standar Braille menjadi rujukan di tingkat pengguna. Proses transisi memakan waktu lebih dari satu dasawarsa hingga memasuki awal era reformasi. Ada sejumlah faktor yang

menandai fase ini dan menyebabkan proses transisi berjalan agak lambat.

a. Berkurangnya Lembaga Pencetak Al-Qur'an Braille

Lembaga pencetak Al-Qur'an braille menjadi pilar penting dalam penyediaan mushaf braille bagi para penyandang disabilitas sensorik netra muslim di Indonesia. YPWG dan Yaketunis adalah dua lembaga pioner yang memiliki kontribusi penting tersebut. Dua lembaga pencetak Al-Qur'an braille ini bukanlah perusahaan yang berorientasi profit, melainkan yayasan yang memang mempunyai tujuan untuk menyediakan mushaf braille. Keberlangsungannya dalam melakukan pencetakan mushaf braille sangat tergantung pada permintaan atau donasi yang didapatkan.

Pasca standarisasi dan ditetapkannya Mushaf Standar Braille, Yaketunis menanggung konsekuensi yang kurang menguntungkan. Sistem penulisan yang ditetapkan dalam Mushaf Standar Braille berbeda secara mendasar dengan sistem yang dikembangkannya, baik dari aspek rasm maupun penggunaan tanda baca tajwid. Perbedaan mendasar inilah yang membuat Yaketunis harus merubah master yang dimiliki. Persoalan biaya menjadi kendala utama yang dihadapi.

Sebelum munculnya Mushaf Standar Braille, Yaketunis mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam melakukan produksi mushaf braille, mulai mesin cetak, tenaga dan anggaran dana pencetakan melalui Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama tahun 1971. Yaketunis secara berturut-turut menerima bantuan dari Departemen Agama berupa *electric machine corporation*, sebuah mesin ketik braille bertenaga listrik pada tahun 1973 dan *thermoform* pada tahun 1975. Dengan perangkat yang telah memadai itu selama kurun tahun 1975 s.d 1977 Yaketunis dapat mencetak kurang lebih 250 set Al-Qur'an melalui proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Al-Qur'an Braille yang telah dicetak dikirim ke berbagai lembaga tunanetra di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia (M. Najamudin 2013). Ketiadaan dukungan dari pemerintah membuat Yaketunis tidak mampu melalui masa transisi dan lebih mengalihkan fokusnya kepada pendidikan Islam, khususnya terkait pengajaran Al-Qur'an braille bagi penyandang disabilitas sensorik netra muslim seperti yang telah dirintisnya.¹

Berbeda dengan kondisi yang dialami Yaketunis, kehadiran Mushaf Standar Braille semakin meneguhkan sistem yang telah dikembangkan YPWG. Sistem penulisan yang dikembangkan YPWG secara prinsip mempunyai kesamaan dengan Mushaf Standar Braille, baik dari sisi rasm maupun penggunaan tanda tajwid. YPWG tidak perlu mengganti master yang dimiliki, melainkan hanya melakukan revisi ringan terkait penyederhanaan tanda-tanda waqaf. Dengan demikian, master Al-Qur'an braille yang sejak awal disusun oleh Abdullah Yatim masih tetap digunakan.²

Selain karena sistem penulisan Mushaf Standar Braille memiliki

1 Wawancara dengan Najamuddin pada tanggal 07 Nopember 2020

2 Wawancara dengan Ayi Ahmad Hidayat pada tanggal 9 Desember 2020

kesamaan secara prinsip dengan mushaf braille hasil pengembangan YPWG sehingga tidak membutuhkan perubahan sistemik, ada beberapa faktor lainnya yang membuat eksistensi percetakan YPWG dapat bertahan.

Pertama, adanya mesin cetak braille (*braille press*) satu-satunya di Indonesia yang dimiliki YPWG, sumbangan dari Dr. Hellen Keller untuk para penyandang disabilitas sensorik netra Indonesia. Mesin tersebut diterima pemerintah Indonesia sekitar tahun 1950-an dan kemudian diserahkan kepada YPWG untuk mencetak buku-buku braille. Mesin *braille press* yang dimiliki YPWG sangat efektif dipakai untuk mengadakan tulisan braille, termasuk Al-Qur'an braille, bahkan memiliki tingkat presisi yang tinggi. Selain *braille press*, YPWG juga mempunyai perangkat lainnya yang tidak bisa dipisahkan, yaitu *stereotype machine*. *Stereotype machine* berfungsi untuk mencetak huruf-huruf braille di atas lembaran-lembaran dari timah (*zinc plate*) yang kemudian dijadikan sebagai master, sedangkan *braille press machine* berfungsi sebagai tempat untuk mencetak *zinc plate* pada lembaran-lembaran kertas (Ayi Ahmad Hidayat 2011).



Gambar 1. *Stereotype machine*.



Gambar 2. *Braille press machine*.

Kedua, Bandung merupakan kota yang ramah untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Keberadaan sejumlah lembaga yang memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas sensorik netra sejak lama telah ada di kota ini. Lembaga Penerbitan dan Perpustakaan Braille Indonesia (LPPBI), salah satu unit teknis di bawah Kementerian Sosial, telah ada sejak tahun 1961 dan saat ini telah berubah nama menjadi Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI).³ Sebuah perkumpulan dengan nama Persatuan Pemuda Islam Tunanetra juga sudah lahir pada tahun 1967. Organisasi ini beberapa kali berganti nama hingga akhirnya menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) pada tahun 1999.⁴ Iklim yang kondusif inilah yang menjadi salah satu faktor YPWG dapat bertahan untuk memproduksi mushaf braille guna memenuhi kebutuhan dan melayani permintaan.

b. Keterbatasan Peran Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an

Salah satu tujuan terpenting ditetapkan pada diktum ketiga Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984 adalah sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur'an. Diktum ini secara langsung menegaskan bahwa semua penerbitan mushaf Al-Qur'an di Indonesia, termasuk Al-Qur'an braille

harus mengikuti Mushaf Standar. Setiap naskah mushaf Al-Qur'an braille yang diajukan ke Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an baru bisa diproses jika telah sesuai dengan Mushaf Standar Braille.

Selama fase transisi lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pentashihan adalah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, sebuah panitia *ad hoc* di bawah Puslitbang Lektur Agama. Para anggota pentashih terdiri dari para ulama Al-Qur'an yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri Agama. Khusus untuk pentashihan mushaf braille, Lajnah melibatkan para praktisi di kalangan penyandang disabilitas sensorik netra, baik dari YPWG maupun Yaketunis. Selama masa transisi Lajnah hanya melakukan pentashihan pada naskah mushaf braille yang diajukan YPWG, satu-satunya pencetak Al-Qur'an braille yang masih eksis selama masa transisi.

YPWG melakukan penyesuaian master Al-Qur'an braille pertama kali pada tahun 1985 dan kemudian diajukan ke Lajnah. Enang Sudrajat adalah satu pegawai Departemen Agama yang mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan proses pentashihan antara tim YPWG dan Yaketunis. Hal ini dilakukan karena pada saat itu tim pentashih Departemen Agama yang biasanya mentashih mushaf cetak belum ada yang memiliki kemampuan mentashih Al-Qur'an braille. Master yang telah ditashih tersebut kemudian menjadi bahan YPWG untuk mencetak 200 set mushaf tanpa terjemahan melalui proyek pengadaan Departemen Agama selama tahun 1985/1986.⁵

Praktis peran Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an pada masa transisi sangat terbatas karena memang hanya satu lembaga yang masih eksis untuk melakukan pencetakan Al-Qur'an braille. Selain itu, tugas yang diemban oleh Lajnah juga terbatas pada pentashihan, belum ada pembinaan dan pengawasan.

c. Minimnya Sosialisasi dan Pembinaan

Kehadiran Mushaf Standar Braille juga menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi dan pengajar Al-Qur'an braille, terutama di lembaga-lembaga penyelenggara pengajaran Al-Qur'an braille untuk melakukan penyesuaian diri. Selama fase transisi proses penyesuaian diri berjalan lambat dan kurang optimal. Minimnya sosialisasi dan pembinaan dari pemangku kebijakan menjadi salah satu penyebabnya.

Pemerintah sendiri melalui Departemen Agama hanya sekali melakukan proyek pengadaan mushaf braille selama fase transisi. Pengadaan tersebut dikerjakan oleh YPWG pada tahun 1985/1986 sebanyak 200 set mushaf braille. Sebagai sarana sosialisasi, jumlah tersebut tentu belum memadai. Selain itu, mushaf braille yang didistribusikan tidak diikuti dengan sosialisasi kebijakan terkait penggunaan Mushaf Standar Braille dan kegiatan pembinaan atau pelatihan. Keterlibatan lembaga swasta untuk

5 Wawancara dengan Ayi Hidayat pada tanggal 18 Desember 2020

ikut mensosialisasikan Mushaf Standar Braille juga belum terlihat.⁶

Selain itu, ada faktor lain terkait penggunaan mushaf braille di tingkat pengguna. Mushaf braille edisi Yaketunis telah tersebar ke sejumlah wilayah Indonesia sejak pertama kali dicetak melalui Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama sebanyak 250 set. Dengan tersebarnya mushaf braille tersebut secara otomatis sistem yang dikembangkan Yaketunis telah melembaga dan menjadi panduan dalam pengajaran Al-Qur'an braille. Tidak mudah bagi penyandang disabilitas sensorik netra terutama para pemula untuk berganti sistem bacaan yang telah dipelajari. Sekalipun mushaf braille yang telah berpedoman kepada Mushaf Standar Braille telah tersedia, namun praktiknya mushaf braille edisi Yaketunis masih digunakan. Selain itu, dibanding edisi YPWD, pengaruh sistem edisi Yaketunis lebih kuat dan mengakar. Ini disebabkan karena Yaketunis tidak hanya mencetak mushaf braille tetapi juga melahirkan para alumni melalui lembaga pendidikan Islam yang dikembangkannya.⁷

Absennya Yaketunis sebagai salah satu lembaga yang ikut memproduksi mushaf braille berpengaruh terhadap penerimaan Mushaf Standar Braille di tingkat pengguna. Menurut pengalaman Ahmad Masykuri, mushaf braille yang berpedoman kepada Mushaf Standar Braille baru mulai diajarkan pada awal tahun 2000. Sebelumnya, banyak lembaga masih mengajarkan Al-Qur'an dengan mushaf braille edisi Yaketunis.⁸

Fase Penguatan I: Mushaf Standar Braille Lebih Memasyarakat (2000-2007)

Pada fase ini Mushaf Standar Braille sudah menjadi satu-satunya rujukan dan pedoman secara luas baik di tingkat penerbitan, pentashihan maupun penggunaan. Ada sejumlah faktor menandai fase ini dan membuat eksistensi Mushaf Standar Braille lebih dikenal dan digunakan di masyarakat pengguna.

a. Lahirnya Lembaga dan Pencetakan Berbasis Teknologi Komputer

Setelah satu dasawarsa lebih YPWD menjadi satu-satunya lembaga yang mencetak Al-Qur'an Braille, baru pada akhir tahun 2000 muncul lembaga yang ikut berkiprah melakukan pencetakan mushaf braille, yaitu Yayasan Roudlatul Makfufin (YRM) dan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI). Bersama YPWD dua lembaga ini ikut memberikan kontribusi dalam penyediaan mushaf

6 Wawancara dengan Yayat Rukhiyat, salah satu tokoh yang aktif berorganisasi dan ikut membidani lahirnya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Periode I kepengurusan ITMI (1999-2004) ia menjabat sebagai sekretaris umum dan periode II (2004-2009) mendapatkan mandat sebagai ketua umum.

7 Beberapa lembaga yang didirikan oleh alumni Yaketunis antara lain Yayasan Raudlatul Makfufin (YRM) Tangerang Selatan, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim (YKTM) Semarang, Yayasan Pendidikan Tunanetra Islam Karunia (Yaptunik) Surabaya dan Yayasan Pembinaan Tunanetra Indonesia (Yapti) Makasar.

8 Wawancara dengan Ahmad Masykuri pada tanggal 11 Desember 2020

braille yang telah berpedoman kepada Mushaf Standar Braille sehingga jumlah ketersediaannya semakin banyak dan terdistribusi secara lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi komputer dalam proses pencetakan mushaf braille menjadi perkembangan baru yang menandai fase ini.

1) Yayasan Raudlatul Makfufin

Sebagai sebuah yayasan yang didirikan oleh Raden Halim Sholeh (w. 2005) pada tanggal 26 Nopember 1983 di Jakarta, Raudhatul Makfufin didedikasikan sejak awal berdirinya sebagai lembaga pengajaran agama Islam bagi penyandang disabilitas sensorik netra muslim.⁹ Untuk menyediakan mushaf braille sebagai sarana pembelajaran Al-Qur'an, Raudlatul Makfufin melakukan pencetakan mushaf braille secara mandiri.

Kehadiran Raudlatul Makfufin membawa satu perubahan baru dalam penggunaan media pencetakan Al-Qur'an braille, yaitu pemanfaatan teknologi komputer dalam pembuatan master. Master Al-Qur'an braille dibuat dalam bentuk *soft file* dengan menggunakan *software* tertentu. Sedangkan proses pencetakannya menggunakan printer khusus yang dikenal dengan *embosser printer*.

Penyusunan master dalam bentuk *soft file* dilakukan Raudlatul Makfufin selama 3 tahun (1996 - 1999) dengan mengacu pada Al-Qur'an braille terbitan YPWG yang telah berpedoman pada Mushaf Standar Braille. Proses penyusunannya melibatkan sebuah tim kecil yang diketuai oleh Irwan Dwi Susanto (seorang *low vision*) dan beranggotakan beberapa praktisi dan teknisi. Di antara anggota yang paling penting kontribusinya adalah Zaenal Abidin, seorang awas yang menguasai penulisan Arab braille dan penggunaan *software* dalam penulisan Al-Qur'an braille.

Untuk pertama kalinya Al-Qur'an braille terbitan Yayasan Raudlatul Makfufin dicetak pada tahun 2000 dan pada tahun yang sama di-*lauching* di Yayasan Asy-Syafi'iyah. Peluncuran dilakukan di yayasan pimpinan Tuty Alawiyah ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan pilihan tempat yang strategis diharapkan keberadaan Al-Qur'an Braille terbitan Raudlatul Makfufin segera dikenal masyarakat luas, sekaligus membuka kesadaran semua pihak agar dapat berkontribusi terhadap pengadaan Al-Qur'an yang sangat dibutuhkan oleh kalangan penyandang disabilitas sensorik netra muslim di Indonesia.

Selang 5 tahun kemudian, upaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil. ESQ pimpinan Ary Ginanjar Agustian bekerjasama dengan Raudlatul Makfufin, mempromosikan gerakan sejuta Al-Qur'an untuk tunanetra. Program ini sempat diluncurkan oleh Hidayat Nur Wahid ketika menjabat Ketua MPR RI.¹⁰ Tahun 2007 Raudlatul Makfufin juga mendapatkan proyek pengadaan Al-Qur'an Braille dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama sebanyak 1000 exemplar.¹¹ Tidak hanya dari

9 <https://makfufin.id/profil/> diakses pada 26/12/2020

10 Gatra Nomor 39, beredar Kamis, 9 Agustus 2007.

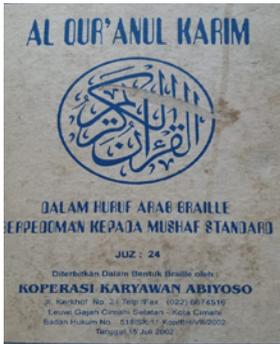
11 Wawancara dengan Zainal Abidin pada tanggal 14 April 2013.

dalam negeri, sejumlah donasi juga datang dari luar negeri. BAPA,¹² sebuah lembaga ketunetraan di Singapura ikut memberikan donasi pengadaan Al-Qur'an Braille terbitan Raudlatul Makfufin. Tidak hanya itu, BAPA juga telah mempromosikan Al-Qur'an Braille Indonesia ini kepada sejumlah praktisi dan pengguna di Singapura.

2) Balai Penerbitan Braille Indonesia

Selain itu, Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso" juga ikut memproduksi mushaf braille berbasis *soft file*. Penyiapan naskah dilakukan oleh Abdullah Yatim, penyusun master Al-Qur'an braille YPWG. Perbedaannya, di YPWG master dibuat secara manual dengan media dari *zinc plate*, sedangkan di BLBI master berbasis *soft file* yang dibuat dengan menggunakan komputer. Acuan yang digunakan dalam penyusunannya berpedoman kepada Mushaf Standar Braille terbitan YPWG. Hasil penulisan kemudian diedit oleh Yuri Purnama dan ditashih dalam bentuk cetak braille oleh Yayasan Rukiyat (tunanetra). Proses penyiapan naskah memakan waktu selama 2 tahun 2001-2002. Edisi ini akhirnya diterbitkan oleh BPBI pada 15 Juli 2002. Selain menggunakan master file, BPBI juga menggunakan *zinc plate* dan *rolling press*. Dua karyawan yang ikut terlibat dalam penyusunan, Yuri Pramono dan Agus Suparman.¹³

Penggunaan komputerisasi dan *embosser printer* yang menandai fase ini dalam pembuatan master Al-Qur'an Braille memang lebih mudah dan praktis. Setiap koreksi yang masih terjadi dapat diperbaiki dengan mudah. Berbeda dengan dengan master *plate*, jika terjadi koreksian, perbaikannya bisa lebih sulit, apalagi jika harus menambah kalimat atau menguranginya, bisa berdampak domino. Namun sebaliknya, hasil cetakan dengan menggunakan *zinc plate* dinilai banyak pengguna memiliki kelebihan dibanding menggunakan *embosser printer*. Di samping mempunyai tingkat presisi yang cukup baik, hasil cetakan *zincplate* mempunyai kerenggangan antara titik braille yang proporsional, tonjolan titik timbul yang maksimal, dan lebih bertahan lama.¹⁴ Sementara hasil cetakan *embosser*



Gambar 3. Halaman depan mushaf braille PBBI Abiyoso.

¹² Badan Agama Dan Pelajaran Radin Mas (BAPA) atau Religious & Educational League Of Radin Mas adalah sebuah organisasi sosial nirlaba yang dibentuk pada tahun 1957 dan telah terdaftar pada 6 Agustus 1960. BAPA bertujuan untuk mengangkat status pendidikan dan ekonomi di kediaman kabupaten Radin Mas dengan menyediakan akses terhadap pendidikan yang terjangkau, baik agama maupun akademis. Saat ini, BAPA telah melakukan peran yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak orang di tingkat nasional dan regional dalam rangka menciptakan sarana dalam melayani masyarakat penyandang cacat baik Muslim maupun Non-Muslim serta program Agama Islam, baik formal maupun informal. <http://www.bapa.org.sg/> diakses 25 April 2013.

¹³ Wawancara dengan Agus Suparman pada tanggal 21 April 2013..

¹⁴ Wawancara dengan Agus Suparman, praktisi Al-Qur'an braille di PBBI Bandung pada tanggal 21 April 2013.

printer sering dihantui oleh munculnya titik yang tidak dikendaki atau sering diistilahkan dengan *gost dot* (titik hantu).

Dalam perkembangan teknologi percetakan mutakhir, telah ditemukan formula baru yang memungkinkan dicapai hasil yang maksimal dan dapat menutupi kelemahan masing-masing jenis cetakan yang telah ada. Pembuatan master tetap dilakukan dengan menggunakan komputer, sementara proses cetaknya juga tetap menggunakan *zinc plate*. Jika selama ini untuk membuat *zinc plate* selalu menggunakan mesin *striotype* yang dilakukan secara manual sebagaimana mesin ketik biasa, perkembangan terbaru sesungguhnya telah ditemukan mesin yang dapat mencetak master dalam bentuk *zinc plate* langsung dari komputer. Mesin inilah yang akan mencetak *zinc plate* dari komputer. Namun tampaknya di kalangan pencetak Al-Qur'an braille di Indonesia mesin yang dimaksud belum ada yang memiliki dan menggunakannya.¹⁵

Dengan keberadaan lembaga-lembaga yang ikut melakukan penerbitan dan pencetakan mushaf braille, jumlah mushaf braille yang disusun berdasarkan Mushaf Braille Standar bertambah banyak. Sejumlah proyek pengadaan, baik dari pemerintah maupun swasta juga bermunculan.

b. Menguatnya Peran Organisasi dan Lembaga

Mushaf Standar Braille semakin mendapatkan tempat di kalangan pengguna juga tidak lepas dari sejumlah organisasi swadaya masyarakat dan lembaga pemerintahan yang memiliki *concern* terhadap upaya sosialisasi dan pembinaan. Organisasi yang cukup memberikan peran penting adalah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Terbentuk dari hasil Musyawarah Nasional Tunanetra Islam (Munasti) di Lembaga Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9-11 Mei 1999, ITMI mempunyai misi penting, yaitu meningkatkan kiprah tunanetra muslim Indonesia dalam mengamalkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai manifestasi misi tersebut ITMI menggiatkan program pembebasan buta huruf Al-Qur'an braille dan pendistribusian mushaf braille dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.¹⁶

Pada tahun 2001 ITMI di bawah kepemimpinan Aan Zuhana menjalin kerjasama dengan Departemen Sosial terkait penyediaan mushaf braille untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sensorik netra muslim di Indonesia. Delegasi ITMI, Yayat Rukhiyat dan Yuri Purnomo melakukan audiensi langsung di kantor Kementerian Sosial. Menteri Sosial saat itu, Bakhtiar Hamzah, memberikan komitmen akan menyiapkan 50 set mushaf braille kepada ITMI untuk didistribusikan. Proses pengadangan 50 set mushaf braille dilakukan oleh Balai Percetakan Braille Indonesia (BLBI), salah satu unit teknis di bawah Departemen Sosial yang bertugas

15 Wawancara dengan Agus Suparman pada tanggal 21 April 2013

16 <https://itmi.or.id/> diakses pada 26 Desember 2020

mencetak buku-buku braille.¹⁷

Fase Penguatan II: Lahirnya Mushaf Standar Braille Edisi Revisi (2007-2014)

Fase ini ditandai dengan lahirnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sejak menjadi sebuah kelembagaan sendiri Lajnah diberikan tugas dan fungsi yang lebih besar, mencakup pentashihan, pengkajian, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi Al-Qur'an. Sejak saat itu, Lajnah mempunyai perhatian yang cukup baik terhadap para penyandang disabilitas sensorik netra muslim terkait mushaf Al-Qur'an braille. Lajnah mulai terlibat dalam sejumlah kegiatan yang diadakan oleh ITMI dalam merespon berbagai dinamika internal mereka terhadap eksistensi mushaf braille yang ada.

Munculnya beberapa lembaga pencetak Al-Qur'an fase sebelumnya, seperti YPWG, Raudlatul Makfufin dan BPBI 'Abiyoso' ternyata menghasilkan produk mushaf braille yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada aspek format dan struktur penyajian. Misalnya, format dalam penulisan nama surah apakah ditulis dengan menggunakan harakat atau tidak. Penempatannya diletakkan di bagian atas kanan atau atas kiri. Selain itu, sistem penulisan yang merujuk pada Mushaf Standar Braille dinilai belum final, perlu ada kajian ulang. Ditambah lagi, kualitas kontrol masing-masing pencetak Al-Qur'an braille yang berbeda menimbulkan potensi kesalahan yang beragam.

Karena faktor itulah yang akhirnya mendorong Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) menginisiasi untuk melakukan sejumlah pertemuan dalam rangka membahas persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Beberapa kegiatan pun dilakukan, seperti Lokakarya yang diadakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bersama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Bandung pada tahun 2007, Workshop Penyempurnaan Standardisasi Penulisan Al-Qur'an Braille yang diselenggarakan oleh Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso" di Bandung pada tahun 2010, dan Semiloka tentang Penyempurnaan Standardisasi Penulisan Al-Qur'an Braille yang digelar oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jakarta pada tahun 2010 (LPMA 2012).

Keterlibatan dan peran pemerintah dalam sejumlah kegiatan tersebut terlihat dengan hadirnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMA) yang saat itu baru terbentuk di bawah kepemimpinan Muhammad Shohib. Peran LPMA menjadi penting sebagai regulator yang akan menyerap dan mengakomodasi berbagai usulan penyempurnaan Mushaf Standar Braille.

¹⁷ Wawancara dengan Yuri Purnomo pada tanggal 23 Nopember 2020

Selain itu, BPBI, salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial juga ikut andil dalam memfasilitasi kegiatan.

Serangkaian kegiatan tersebut akhirnya berhasil melahirkan rekomendasi sejumlah penyempurnaan sistem penulisan Al-Qur'an braille dalam Mushaf Standar Braille, baik dari sisi format maupun kaidah penulisannya. Dari sisi format usulan penyempurnaan mencakup penempatan tahun hijrah dan masehi pada lembar cover; cara penulisan dan penempatan awal surah, nama surah, tempat turun surah dan jumlah ayat; serta teknis penulisan nama surah yang lebih dari satu. Dari sisi substansi penyempurnaan yang dilakukan meliputi penggunaan tanda baca dan kaidah penulisan hamzah. Hasil rumusan penyempurnaan ini setidaknya menjadi bagian upaya untuk menghasilkan terbitan mushaf braille yang seragam sehingga tidak menimbulkan potensi polemik di kalangan pengguna.

Sebagai fasilitator sekaligus regulator LPMA berupaya untuk merespon dinamika yang muncul di kalangan tunanetra muslim terkait keinginan adanya penyempurnaan pada Mushaf Standar Braille. Pada tahun 2011, tepat satu tahun setelah rekomendasi penyempurnaan dihasilkan, LPMA mengadakan kegiatan kajian dan penyusunan Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an. Kegiatan ini menjadi penting dan strategis karena selepas Mushaf Standar Braille ditetapkan memang belum tersedia panduan yang mengurai sistem penulisan Mushaf Standar Braille secara rinci dan komprehensif, sehingga sangat dimaklumi jika ditemukan perbedaan dan inkonsistensi dalam penerapan kaidah. (Yunardi 2012) Sejumlah buku pedoman penulisan Al-Qur'an braille memang sudah bermunculan yang disusun oleh sejumlah praktisi atau pengajar, namun masih sangat sederhana dan lebih difungsikan sebagai bahan ajar, bukan sebagai pedoman penulisan mushaf Al-Qur'an braille. Beberapa praktisi yang telah menulis buku sejenis tersebut di antaranya Abdullah Yatim, Aan Zuhana, Yayat Rukhiyat, dan sejumlah praktisi atau pengajar lainnya.

Upaya kajian dan penyusunan Pedoman Menulis dan Membaca Al-Qur'an Braille ini sekaligus sebagai evaluasi terhadap Mushaf Standar Braille yang telah ada dengan menjaring dan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang. Oleh karena itu, sejumlah pihak dari kalangan penyandang disabilitas sensorik netra ikut dilibatkan, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun lembaga pencetak Al-Qur'an braille, seperti ITMI, YPWG dan Raudlatul Makfufin. Dari kalangan Kementerian Agama, tim yang terlibat berasal dari para pentashih LPMA dan peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan. Sedangkan keterlibatan Kementerian Sosial diwakili oleh BPBI. Sejumlah nama termasuk yang pernah ikut dalam proses penyusunan Mushaf Standar Braille sebelum ditetapkan pada tahun 1984 antara lain Abdullah Yatim (YPWG), Aan Zuhana (ITMI), dan E. Badri Yunardi (Puslitang Lektur Keagamaan). Kontribusi mereka cukup penting dalam memberikan informasi dan pertimbangan pada setiap diskusi yang berkembang.

Setelah melalui sejumlah rangkaian kegiatan kajian, Buku Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille akhirnya tersusun. Pedoman yang berhasil disusun berisikan kaidah-kaidah penulisan yang lebih rinci dan komprehensif. Selain itu, pedoman juga mengatur tentang format terbitan mushaf braille. Pedoman ini juga telah mengakomodasi sejumlah usulan yang berkembang sehingga secara tidak langsung melahirkan bentuk revisi atas Mushaf Standar Braille yang telah ditetapkan tahun 1984. Di antara revisi yang paling mendasar adalah terkait penghilangan tanda mad jaiz dan penulisan hamzah.

a) Penghilangan tanda *madd jā'iz*.

Dalam penulisan Al-Qur'an Standar Braille digunakan simbol yang sama untuk menunjukkan *madd wājib* dan *madd jā'iz*. Akibatnya, para pembaca pemula kesulitan untuk membedakannya, tidak sebagaimana dalam mushaf Al-Qur'an cetak untuk orang berpenglihatan, hanya dengan memperhatikan perbedaan bentuk simbol tanda mad, para pembaca pemula bisa membedakan antara *madd wājib* dan *madd jā'iz*. Dengan demikian, revisi penghapusan tanda *madd jā'iz* dalam penulisan Mushaf Standar Braille adalah untuk memudahkan dalam membedakan bacaan *madd wājib* dan *madd jā'iz*. Selain itu, bacaan *madd jā'iz* masih bisa dikenali melalui keberadaan spasi.

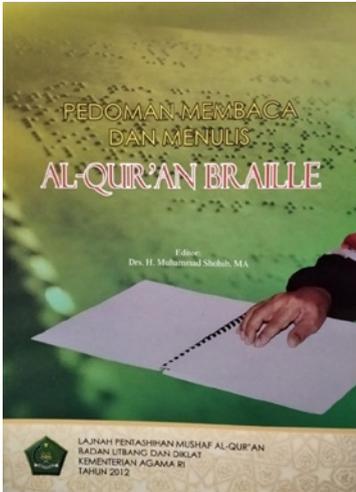
b) Mengembalikan sistem penulisan hamzah berdasarkan Mushaf Standar Usmani.

Salah satu kerumitan sistem tulisan Arab adalah penulisan hamzah. Bagaimana hamzah ditulis tergantung pada posisinya dalam sebuah kata. Sebagaimana dalam sistem penulisan Mushaf Standar Braille sebelumnya, ada sejumlah kaidah yang diterapkan dalam penulisan hamzah sebagaimana yang berlaku dalam kaidah imlaiyah. Karena ada semangat dan keinginan sebagian kalangan praktisi dan pengguna Al-Qur'an braille untuk menjadikan sistem penulisan Mushaf Standar Braille tidak jauh berbeda dengan Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani, maka revisi penulisan hamzah pun dilakukan. Dengan demikian, revisi ini membuat aspek rasm imlai dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille berkurang. Meskipun dalam beberapa kasus, karena alasan praktis demi kemudahan, beberapa penulisan hamzah tetap menggunakan rasm imlai.

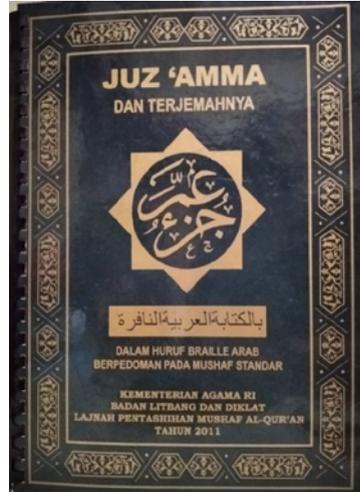
Selain melakukan kajian dan penyusunan buku pedoman, LPMA juga menyusun Juz 'Amma dan Terjemahnya Braille sebagai bentuk aplikasi pedoman yang telah disusun. Dua hasil kajian akhirnya dapat dihasilkan, Buku Pedoman Menulis dan Membaca Al-Qur'an Braille dan Juz 'Amma Braille disertai dengan terjemahnya.

Dalam rangka sosialisasi, sekaligus menjaring berbagai masukan, saran dan kritik yang konstruktif, LPMA menyelenggarakan Sidang Pleno yang diadakan pada tanggal 19 – 21 Oktober 2011 dengan menghadirkan para praktisi dan pengguna Al-Qur'an braille dari berbagai kalangan. Selain menyambut baik kehadiran dua produk tersebut, Sidang Pleno juga

merekomendasikan agar LPMA menyusun kembali Mushaf Al-Qur'an Standar berdasarkan Buku Pedoman yang telah disusun.



Gambar 4. Buku Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille.



Gambar 5. Buku Juz 'Amma Braille dan Terjemahnya.

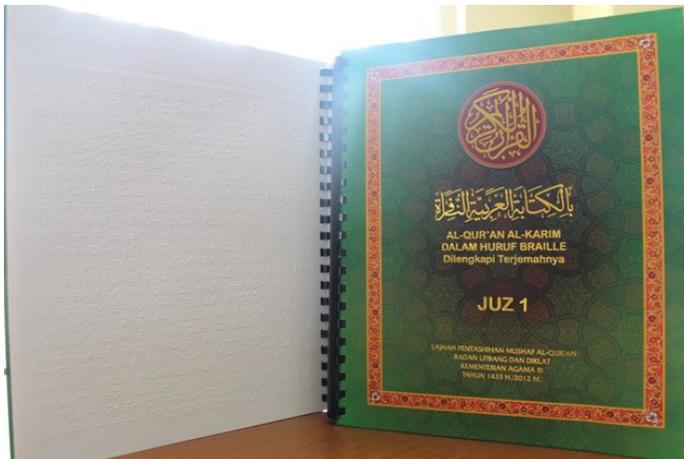
Harapan untuk menyusun Mushaf Al-Qur'an Braille dalam 30 juz juga muncul ketika kedua karya tersebut ini di-*lauching* oleh Menteri Agama di Jakarta pada 13 Desember 2011. Selain memberikan sambutan hangat dan apresiasi, Menteri Agama memberikan amanat kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk melakukan penyusunan Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya lengkap 30 juz.

Setelah Pedoman Menulis dan Membaca Al-Qur'an Braille tersusun dan telah disosialisasikan ke sejumlah lembaga maupun praktisi di kalangan tunanetra muslim, muncul respon dari Yaketunis, salah satu lembaga perintis dan pelopor pengajaran Al-Qur'an braille. Respon tersebut disampaikan melalui Surah dengan nomor 17/Sekr/Yks/1/2012 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan didisposisi ke LPMA (LPMA 2012). Dalam Surah tersebut Yaketunis menyampaikan hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari sejumlah pengurus dan praktisi, termasuk salah satunya M. Najamuddin, salah satu tokoh yang ikut serta dalam proses penyusunan Mushaf Standar Braille sebelum ditetapkan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Yaketunis menyampaikan sejumlah kaidah terkait penulisan hamzah. Perubahan sistem penulisan hamzah ke dalam kaidah rasm usmani mengundang perhatian dan pertanyaan dari Yaketunis karena menyalahi kaidah yang sudah berlaku dalam Mushaf Standar Braille yang telah ditetapkan tahun 1984 (Tim Pengkaji 2012). Pertanyaan ini muncul karena Yaketunis secara kelembagaan maupun para

praktisnya memang tidak terlibat dalam kegiatan Kajian dan Penyusunan Pedoman sehingga tidak memahami proses yang berlangsung sekaligus tidak merasa ikut menyetujui kesepakatan yang dilakukan.

Persoalan representasi kelembagaan menjadi salah satu faktor penting diterimanya sebuah produk kebijakan. Oleh karena itulah, LPMA melibatkan seluruh lembaga dan praktisi, termasuk Yaketunis dalam penyusunan Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya 30 Juz. Sebagai lembaga perintis dan pelopor bersama YPWG keberadaan Yaketunis menjadi penting setidaknya dapat mengawal kesinambungan perjalanan Mushaf Standar Braille sejak dilahirkan hingga melewati sejumlah proses revisi dan penyempurnaan.

Kegiatan kajian dan penyusunan Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya 30 juz dilakukan selama dua tahun (2012-2013) dengan komposisi tim yang sama seperti yang pada tim penyusunan pedoman ditambah dengan Yaketunis. Tahun pertama tim menyelesaikan 15 juz pertama dan tahun kedua 15 juz terakhir. Dalam kegiatan kajian dan penyusunan ini, tim pentashih LPMA ikut terlibat secara intens. Ada sejumlah tenaga pentashih yang akhirnya mampu menguasai sistem penulisan Al-Qur'an braille sehingga dapat melakukan pentashihan secara mandiri.



Gambar 6. Mushaf Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya.

Setelah Al-Qur'an braille dan terjemahnya 30 juz tersusun, LPMA menerbitkan dalam jumlah terbatas dan dibagikan ke sejumlah lembaga, baik percetakan maupun yayasan pendidikan. Edisi ini tampaknya menjadi edisi penyempurnaan yang sudah bisa diterima oleh semua pihak. Representasi kelembagaan maupun unsur ketokohan menjadi faktor determinan.

Seiring dengan hadirnya Mushaf Standar Braille dengan edisi

penyempurnaan, muncul juga sejumlah lembaga yang ikut mencetak dan menerbitkan Mushaf Al-Qur'an Braille. Di antaranya Mitra Netra Jakarta, Voyer Media Jakarta dan Al-Hikmah Yogyakarta. Ketiga lembaga tersebut menggunakan master Al-Qur'an braille dalam bentuk *soft file* dengan memanfaatkan *embosser printer* untuk mencetaknya.

Dari sisi pentashihan, sejak hadirnya Mushaf Standar Braille versi penyempurnaan, kegiatan pentashihan dapat dilakukan secara mandiri oleh LPMA. Ada sejumlah tenaga pentashih yang telah mampu membaca Al-Qur'an braille dan menguasai sistem penulisannya. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, pentashihan Al-Qur'an braille dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LPMA. Tim yang ditunjuk berasal dari kalangan tunanetra yang mempunyai kemampuan melakukan pentashihan dan biasanya merupakan tenaga ahli di masing-masing percetakan.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disarikan bahwa sejarah perkembangan Mushaf Standar Braille pasca ditetapkan begitu dinamis. Dinamika tersebut tergambar dalam dua fase, yaitu fase transisi dan fase penguatan. Fase transisi ditandai sejumlah faktor yang menyebabkan proses peralihan menuju Mushaf Standar Braille berjalan lambat. Faktor tersebut di antaranya terkait dengan eksistensi lembaga pencetak Al-Qur'an braille dan minimnya upaya sosialisasi serta pembinaan. Akibatnya, eksistensi Mushaf Standar Braille belum sepenuhnya menjadi rujukan di tingkat pengguna. Fase berikutnya merupakan fase penguatan yang ditandai tumbuhnya lembaga pencetak Al-Qur'an braille dengan memanfaatkan teknologi komputer dan Mushaf Standar Braille sudah menjadi rujukan dan telah digunakan secara lebih luas. Sedangkan fase akhir merupakan fase penguatan dalam aspek penulisan Al-Qur'an braille yang ditandai dengan lahirnya Mushaf Standar Braille edisi revsi. Dari seluruh dinamika tersebut peran pemerintah menjadi kunci.

Daftar Pustaka

- Hidayat, Ayi Ahmad. 2011. "Proses Percetakan Al-Qur'an Braille", Makalah disampaikan pada Sidang Pleno yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada 19-21 Oktober 2011 di Grand Zuhri Bekasi Jawa Barat.
- Jaeni, Ahmad. 2013. 'Aplikasi Braille dalam Penulisan Al-Qur'an : Kajian atas Mushaf Al-Qur'an Standar Brille Indonesia', *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, Jakarta: LPMA, 2013.
- Jaeni, Ahmad. 2015. 'Sejarah Perkembangan Al-Qur'an Braille di Indonesia: Dari Duplikasi Hingga Standardisasi', *Suhuf*. Vol. 8, No. 1, Juni 2015, Jakarta: LPMA, 2015
- Jaeni, Ahmad, 2016. 'Problematika Pengajaran Al-Qur'an Bagi Tunanetra: Pengajaran Al-Qur'an Braille di Palembang dan Begkulu'. *Suhuf*. Vol. 9 Nomor 2. Jakarta: LPMQ.
- Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. 1974. *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama.
- Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. 1977. *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama.
- Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Hasil Musyawarah Kerja IV Ulama Al-Qur'an, Jakarta: Departemen Agama RI, 1978.
- , 2012. *Al-Qur'an Braille: Al-Qur'ān al-Karīm bi al-Kitābah al-'Arabīyyah an-Nāfirah*. Malaysia: Pertumbuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia,.
- , 1952. *Al-Qur'an ul-Karim*, Yordania: al-Hai'ah al-'Ilmiyyah al-Islāmiyah,
- , 1976. *Al-Qur'an ul-Karim bil-Kitābah al-'Arabīyyah an-Nāfirah*. Bandung: Proyek Penerbitan Al-Qur'an Braille Wyata Guna.
- , 1977. *Al-Qur'an ul-Karim bil-Kitābah al-'Arabīyyah an-Nāfirah*. Yogyakarta: Yaketunis.
- Purwanggono, Bambang dkk. 2009. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Shohib, Muhammad (edit.). 2012. *Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille*, Jakarta: LPMA.
- Shohib, Muhammad (edit.) 2015. *Sejarah Mushaf Standar Indonesia*. Jakarta: LPMA.
- Yunardi, E. Badri. 2012. 'Sejarah Mushaf Al-Qur'an Standar Braille', *Suhuf*. Jakarta: LPMA, Vol. 5, No. 2.
- Zarif, Muhammad Mustaqim Mohd. 2013. *Braille Al-Qur'an : Sejarah dan Kaedah*. Bandar Bari Nilai Negeri Sembilan: USIM.